

**ANALISIS RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH, DAN *DEBT SERVICE COVERAGE RATIO* (DSCR) DALAM  
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2013 – 2017**

Oleh :

Yulitiawati\*

[yulitiawati0707@gmail.com](mailto:yulitiawati0707@gmail.com)

Dosen Prodi Akuntansi Universitas Baturaja

Ana Mustika\*\*

[anamustika2017@gmail.com](mailto:anamustika2017@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the performance and financial capability of the Local Government of Ogan Komering Ulu in the fiscal year of 2013-2017, it is measured by calculating the fiscal decentralization degree ratio, local financial independence, and Debt Service Coverage Ratio (DSCR). The analysis method used in this research is quantitative descriptive analysis. The result shows that the financial performance of the Local Government of Ogan Komering Ulu based on the analysis of the fiscal decentralization degree ratios obtained the average percentage of 8.49% with the criteria of local financial capability is very less. The financial performance of the Local Government of Ogan Komering Ulu based on an analysis of the regional financial independence ratio is obtained the average percentage of 10.94% with very low local financial capability criteria and the local government financial performance in the pattern of instructive relations. While the financial performance of the local government of Ogan Komering Ulu based on Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is obtained at nil, so it can not be analyzed.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization Degree Ratio, Local Financial Independence, and Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

**PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan setiap tahunnya wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berlaku umum.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi penerimaan dan belanja daerah yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran (Purba dan Hutabarat, 2017). Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama disajikan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Analisis rasio keuangan merupakan suatu kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, sehingga hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan ialah rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari rasio keuangan pada tahun anggaran 2013-2017 ?
2. Bagaimana kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari rasio keuangan pada tahun anggaran 2013-2017 ?

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari rasio keuangan pada tahun anggaran 2013-2017.
2. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ditinjau dari rasio keuangan pada tahun anggaran 2013-2017.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina, dkk (2015:23-99) pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi

laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

#### a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

#### b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pos-pos berikut yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

#### c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur dalam neraca meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.

#### d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menghubungkan antara laporan operasi dengan neraca, sehingga penyusunan laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Purba dan Hutabarat (2017) mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi penerimaan dan belanja daerah yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

### Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Faud (2016:137-138) mendefinisikan analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah.

### Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan

Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah salah satu analisis rasio keuangan yang dapat digunakan terdiri dari :

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Purba dan Hutabarat, 2017). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1**  
**Skala Interval Rasio Derajat**  
**Desentralisasi Fiskal**

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Cukup
30,01 – 40,00%	Sedang
40,01 – 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2017

**b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan sesuai target yang ditetapkan terhadap pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim dan Kusufi, 2012:L-5). Rasio kemandirian keuangan daerah di ukur dengan:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2**  
**Kriteria Tingkat Kemandirian dan**  
**Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25 %	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2017

Keterangan:

- Pola Hubungan Instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena

daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

(Mahmudi, 2016:143) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{PAD + BP + DAU - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan:

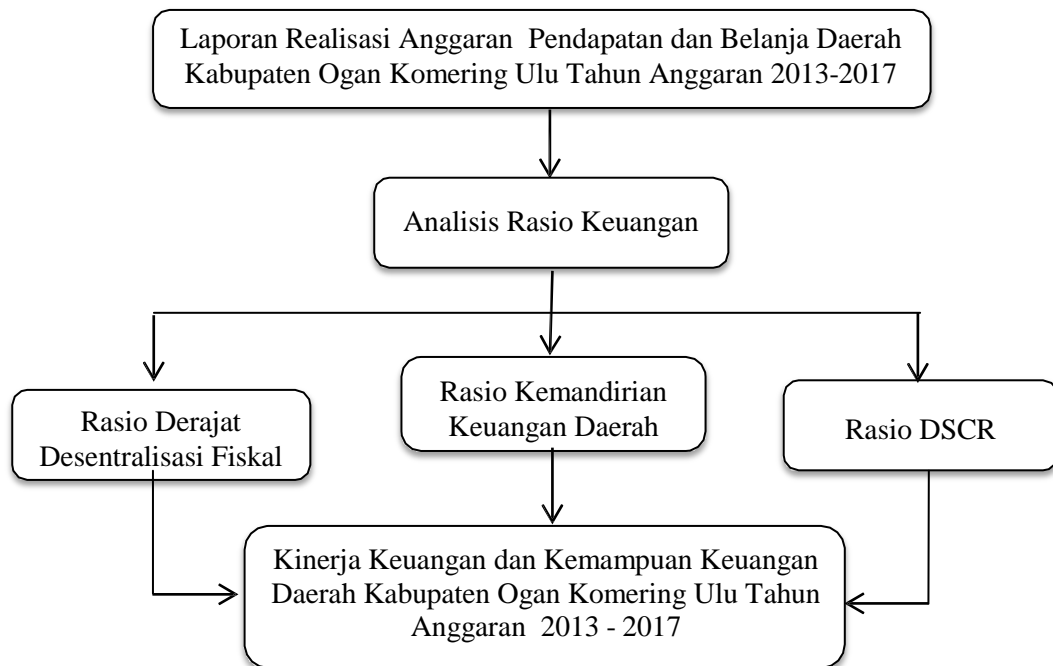
- BW = belanja pegawai dan belanja anggota DPRD

Berdasarkan rasio ini, pemerintah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal 2,5. Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga (Mahmudi, 2016:144).

**Kerangka Pemikiran**

Terdapat skema kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian guna memudahkan dalam gambaran pola berfikir untuk menjawab dari rumusan dan tujuan masalah di atas, maka dapat dikemukakan kerangka

pemikiran yang tampak pada gambar sebagai berikut ini:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini tentang Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013-2017.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:137) data sekunder adalah data yang diberikan tidak langsung kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diambil adalah data Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan mulai dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen publikasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis**

#### **a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Besarnya rasio derajat desentralisasi fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran**  
**2013-2017 (Dalam Rupiah)**

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah (TPD)	Rasio DDF	Keterangan
2013	44.679.789.248	978.833.089.837	4,57%	Sangat Kurang
2014	79.344.461.050	1.083.700.903.704	7,32%	Sangat Kurang
2015	98.756.154.905	1.034.793.698.360	9,54%	Sangat Kurang
2016	87.578.643.416	1.192.981.912.662	7,34%	Sangat Kurang
2017	172.039.307.591	1.396.270.713.787	12,32%	Kurang
Rata-Rata	96.479.671.242	1.137.316.063.670	8,49%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2019)

**b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada TA 2013 persentase rasio derajat desentralisasi fiskal diperoleh sebesar 4,57%, terjadi kenaikan pada TA 2014 dan TA 2015 masing-masing diperoleh sebesar 7,32% dan 9,54%, terjadi penurunan di TA 2016 dengan persentase rasio derajat desentralisasi fiskal diperoleh sebesar 7,34%, dan naik kembali di TA 2017 dengan persentase diperoleh sebesar 12,32%. Hal tersebut terjadi dikarenakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi kenaikan yang signifikan pada TA 2013 dari Rp 44.679.789.248 menjadi Rp 172.039.307.591 di TA 2017, hanya saja di TA 2016 sempat terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh sebesar Rp 87.578.643.416 akan tetapi persentase angka rasio derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh pada TA 2013 sampai dengan TA 2016 berada pada skala interval 00,00 - 10,00% dengan kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah sangat kurang, sedangkan pada TA 2017 kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah kurang karena berada pada skala interval 10,01 - 20,00%. Apabila di lihat secara keseluruhan persentase rata-rata diperoleh sebesar 8,49% dengan kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah sangat kurang karena berada pada skala interval 00,00 - 10,00%.

**Tabel 4**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ogan**  
**Komering Ulu Tahun Anggaran 2013-2017 (Dalam Rupiah)**

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Transfer Pusat-Dana Perimbangan	Pinjaman	Rasio Kemandirian	Keterangan
2013	44.679.789.248	775.414.033.247	-	5,77%	Instruktif
2014	79.344.461.050	888.714.166.946	-	8,92%	Instruktif
2015	98.756.154.905	773.046.266.128	-	12,78%	Instruktif
2016	87.578.643.416	939.928.247.711	-	9,31%	Instruktif
2017	172.039.307.591	1.031.818.532.773	-	16,68%	Instruktif
Rata-Rata	96.479.671.242	881.784.249.361	-	10,94%	Instruktif

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada TA 2013 persentase rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh sebesar 5,77%, terjadi kenaikan pada TA 2014 dan TA 2015 masing-masing diperoleh sebesar 8,92% dan 12,78%, terjadi penurunan di TA 2016 dengan persentase rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh sebesar 9,31%, dan terjadi kenaikan kembali di TA 2017 dengan persentase diperoleh sebesar 16,68%. Sedangkan persentase rata-rata diperoleh sebesar 10,94%. Persentase angka rasio kemandirian keuangan

daerah yang diperoleh dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 secara keseluruhan berada pada kriteria kemandirian 0% - 25% dengan kemampuan keuangan daerah rendah sekali dan kinerja keuangan pemerintah daerah berada dalam pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

**c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

Besarnya *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran**  
**2013-2017 (Dalam Rupiah)**

Keterangan	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44.679.789.248	79.344.461.050	98.756.154.905
Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak)	237.213.871.247	310.676.775.946	193.633.944.128
Dana Alokasi	517.309.972.000	568.771.201.000	268.562.532.000

Umum (DAU)			
Jumlah	799.203.632.495	958.792.437.996	560.952.631.033
Belanja Wajib (Belanja Pegawai)	448.049.483.340	464.037.611.728	543.817.646
Pokok Angsuran (Pembayaran Pokok Utang)	-	16.068.076.704	-
Bunga (Belanja Bunga)	-	-	-
Biaya Pinjaman	-	-	-
Jumlah	-	16.068.076.704	-
Rasio DSCR	Nihil	30,80	Nihil

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	87.578.643.416	79.344.461.050
Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak)	169.570.914.866	310.676.775.946
Dana Alokasi Umum (DAU)	635.551.932.000	568.771.201.000
Jumlah	892.701.490.282	958.792.437.996
Belanja Wajib (Belanja Pegawai)	570.405.694.164	492.307.724.349
Pokok Angsuran (Pembayaran Pokok Utang)	-	-
Bunga (Belanja Bunga)	-	-
Biaya Pinjaman	-	-
Jumlah	-	-
Rasio DSCR	Nihil	Nihil

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa pada TA 2014 nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) diperoleh sebesar 30,80. Sedangkan nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pada TA 2013, TA 2015, TA 2016, dan TA 2017 diperoleh nihil.



## Pembahasan

**Tabel 6**  
**Rekapitulasi Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 – 2017**

Jenis Rasio	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata	Keterangan
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	4,57%	7,32%	9,54%	7,34%	12,32%	8,49%	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh masih sangat kurang untuk membiayai pembangunan daerah.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,77%	8,92%	12,78%	9,31%	16,68%	10,94%	Penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah sekali.
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	Nihil	30,80	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Hasil analisis diperoleh nihil sehingga tidak dapat dianalisis

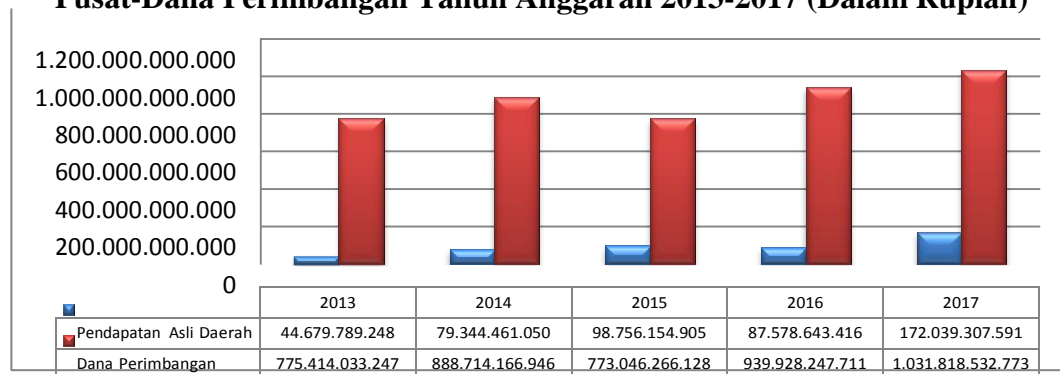
### a. Rasio Derajat

#### Desentralisasi Fiskal

Kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan sangat baik apabila hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada skala interval  $> 50,00\%$ . Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan hasil analisis pada tabel 6 di atas berada pada skala interval  $00,00 - 10,00\%$  dengan tingkat kriteria kemampuan keuangan daerah sangat kurang.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan transfer-dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat lebih mendominasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Berikut ini adalah data mengenai jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pendapatan transfer-dana perimbangan yang dijelaskan dalam gambar grafik berikut ini:

**Gambar 2**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013-2017 (Dalam Rupiah)**



Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:40) semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Meskipun kenyataannya dari penjelasan gambar 2 di atas, kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 terus mengalami kenaikan, akan tetapi kontribusi penerimaan pendapatan transfer-dana perimbangan dari pemerintah pusat juga semakin mengalami kenaikan. Artinya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 belum bisa mencukupi untuk pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pemerintah daerah masih sangat cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari TA 2013 sampai dengan TA 2017, maka masih rendahnya juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal.

### **b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

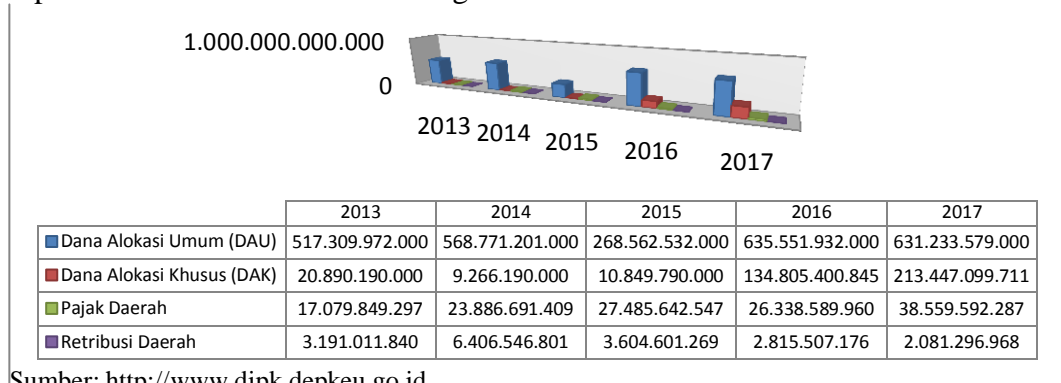
Kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan sudah mandiri apabila hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria kemandirian 75% - 100% dengan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah

pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan hasil analisis rasio pada tabel 6 di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:140) semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. Berdasarkan pernyataan tersebut tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari TA 2013 sampai dengan TA 2017

terjadi peningkatan, akan tetapi belum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mandiri dalam keuangannya, hal ini dikarenakan persentase rasio kemandirian keuangan daerah dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 berada pada kriteria kemandirian 0% - 25% dengan pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) dan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali.

Keadaan ini menunjukkan bahwa selama TA 2013 sampai dengan TA 2017 penerimaan pendapatan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah masih sangat

rendah bila dibandingkan dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh dari pemerintah pusat. Artinya penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selama TA 2013 sampai dengan TA 2017 masih belum bisa mencukupi untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah data mengenai besarnya penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2013 sampai dengan TA 2017 yang dijelaskan dalam gambar grafik berikut ini:



**Gambar 3**

**Perkembangan Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Serta Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013-2017 (Dalam Rupiah)**

**c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan hasil analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pada tabel 6 di atas diperoleh nihil, hanya saja pada TA 2014 nilai rasio diperoleh sebesar 30,80 sehingga dalam penelitian ini analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak dapat dianalisis, hal ini dikarenakan data yang berhubungan dengan analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

tidak ada berdasarkan data Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan sudah di cek pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu juga tidak ada.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di ukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal selama TA 2013 sampai dengan TA 2017 persentase rata-rata diperoleh sebesar 8,49% berada pada skala interval 00,00 - 10,00% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sangat kurang.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di ukur dengan analisis rasio kemandirian keuangan daerah selama TA 2013 sampai dengan TA 2017 persentase rata-rata diperoleh sebesar 10,94 berada pada skala interval 0% - 25% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah rendah sekali dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu di ukur dengan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak dapat dianalisis, hal ini dikarenakan data yang berhubungan dengan analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak ada berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan sudah di cek pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu juga tidak ada.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan lebih berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggali dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat menurun, walaupun pemerintah daerah masih memungkinkan membutuhkan dana transfer dalam rangka percepatan pembangunan daerah akan tetapi tidak terlalu mendominasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan lebih berupaya meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dikarenakan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki banyak objek wisata alam yang merupakan aset daerah. Berdasarkan data yang diperoleh

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tahun 2013 jumlah wisatawan domestik sebanyak 9.137 menjadi 12.145 wisatawan di tahun 2017, sedangkan wisatawan dari mancanegara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 masih sangat sedikit hanya ada 10 wisatawan (Sumber: <https://okukab.bps.go.id> Tentunya hal ini akan dapat meningkatkan sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah selain itu akan menjadi aset jangka panjang bagi pemerintah daerah.

3. Pembahasan analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) ini sangat menarik dikarenakan dapat mengukur batas kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman daerah, akan tetapi dalam penelitian ini tidak dapat dianalisis dikarenakan data yang berhubungan dengan analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak ada. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memiliki ketersediaan data secara lengkap dalam menganalisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

*Komering Ulu Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.* Diambil dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

- Erlina, O.S. Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah : Berbasis Akrua*. Salemba Empat, Jakarta.
- Faud, M.R. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Halim, A. dan M.S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Purba, S. dan R.C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1 (1) : 228-240.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diambil dari <https://m.hukumonline.com>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 2016*. Diambil dari [okukab.bps.go.id](http://okukab.bps.go.id) Pada Tanggal 20 Mei 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 2018*. Diambil dari [okukab.bps.go.id](http://okukab.bps.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Ogan*